

# Ketidakjelasan Komitmen dan Implementasi Pemerintah dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang Berat

Totok Yuliyanto  
Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI

# (JANJI JOKOWI)

Menghormati  
HAM dan  
Penyelesaian  
Secara  
Berkeadilan  
Terhadap Kasus-  
Kasus  
Pelanggaran  
HAM Masa lalu



# NAWACITA

## JOKOWI - JK 9 PROGRAM PERUBAHAN UNTUK INDONESIA

**1** Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

- Membangun politik legislatif yang kuat: Pemberantasan korupsi, penegakan HAM, Perlindungan lingkungan hidup & reformasi lembaga penegakan hukum
- Memperkuat KPK
- Memberantas mafia peradilan
- Pemberantasan tindakan pennebanan liar, perikanan liar, dan penambangan liar
- Pemberantasan narkoba dan psikotropika
- Pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang
- Menjamin kepastian hukum dan kepemilikan tanah
- Melindungi anak, perempuan dan kelompok masyarakat marginal
- Menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu
- Membangun budaya hukum

**4** Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

- Politik luar negeri bebas aktif
- Melindungi hak dan keselamatan WNI di luar negeri, khususnya pekerja migran
- Kedaulatan maritim
- Meningkatkan anggaran pertahanan 1,5% dari GDP dalam 5 tahun ke depan
- Mengembangkan industri pertahanan nasional
- Menjamin rasa aman warganegara dengan membangun Polri yang profesional

**7** Merwujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

- Membangun kedaulatan pangan
- Merwujudkan kedaulatan energi
- Merwujudkan kedaulatan keuangan
- Mendirikan bank petani/nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas pengolahan paska panen di tiap sentra produksi tani/nelayan
- Merwujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional

**2** Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

- Desentralisasi asimetris
- Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia, dan kawasan perbatasan
- Penguatan daerah otonomi baru untuk kesejahteraan rakyat
- Implementasi UU Desa

**5** Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

- Memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan
- Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan
- Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan secara lebih efektif
- Membangun transparansi tata kelola pemerintahan
- Menjalankan reformasi birokrasi
- Membuka partisipasi publik

**8** Melakukan revolusi karakter bangsa.

- Membangun pendidikan kewarganegaraan
- Mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional
- Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil
- Memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi
- Memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang iptek

**3** Memper teguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.




- Memperkuat pendidikan ke-bhineka-an dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga
- Restorasi sosial untuk mengembalikan ruh dan kerukunan antar warga
- Membangun kembali gotong royong sebagai modal sosial melalui rekstruktural sosial
- Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal
- Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya

**6** Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

- Program "Indonesia Pintar" melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan
- Program kartu "Indonesia Sehat" melalui layanan kesehatan masyarakat
- Program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" melalui reformasi agraria 9 juta Ha untuk rakyat tani dan buruh tani, rumah susun bersubsidi dan jaminan sosial

**9** Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

- Membangun infrastruktur jalan baru sepanjang sekurang-kurangnya 2.000 km
- Membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama
- Membangun sekurang-kurangnya 10 bandara baru dan merenovasi yang lama
- Membangun sekurang-kurangnya 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya
- Membangun sekurang-kurangnya 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasi pasar tradisional yang telah ada
- Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perizinan bisnis menjadi maksimal 15 hari
- Membangun sejumlah science and technopark di kawasan Politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana teknologi terkini.

 Did PPI Kominfo
  Did PPI Kominfo
  Did PPI Kominfo
  Did PPI Kominfo
  Did PPI Kominfo



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

[BERANDA](#)[PROFIL](#) ▾[PUBLIKASI](#) ▾[INFORMASI & LAYANAN PUBLIK](#) ▾[PEMERINTAH](#) ▾

kepentingan rakyat, dan membawa negara kita Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

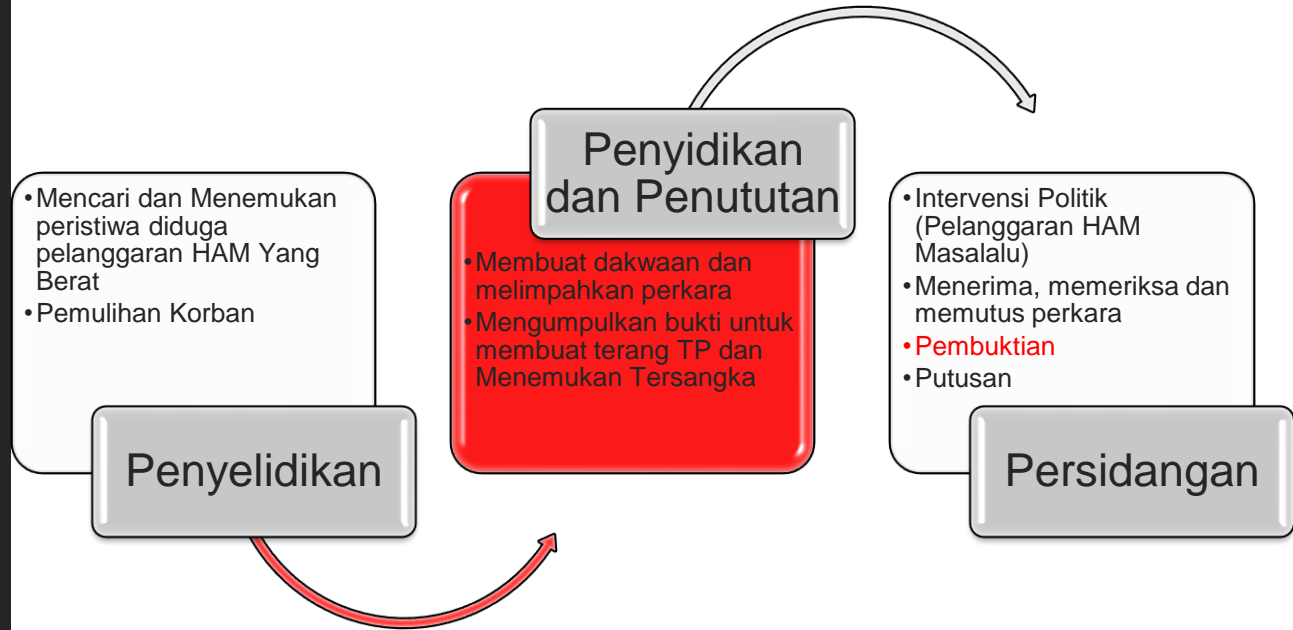
Selain komitmen di atas, komitmen penuntasan masalah HAM masa lalu harus terus dilanjutkan. Kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Kemajuan konkret dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu perlu segera terlihat. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Komnas HAM perlu untuk diefektifkan.

Antisipasi terhadap tantangan masa depan juga harus terus ditingkatkan. Kejaksaan harus melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan ke depan. Kejaksaan harus menjadi bagian untuk mencegah dan menangkal kejahatan terhadap keamanan negara,



## Tantangan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Melalui Mekanisme Yudisial

- Komitmen penegak hukum dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat
- Perlunya ada dukungan politik khususnya dalam perkara pelanggaran HAM Berat Masa lalu
- Permasalahan Penolakan berkas penyelidikan oleh Penyidik
- Semakin lama proses hukum, semakin banyak bukti yang hilang
- Putusan Bebas kasus pelanggaran HAM yang berat
- Kompensasi, Restitusi, Reparasi dicantumkan dalam putusan



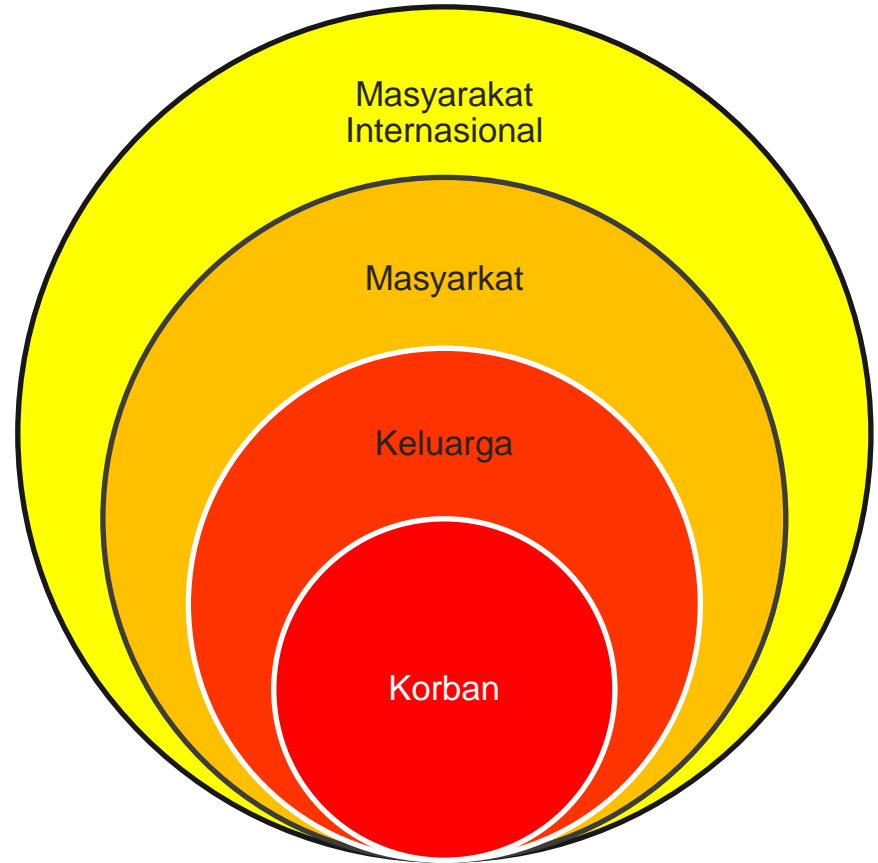
# Dampak Impunitas Pelaku Pelanggaran yang HAM Berat

Ketidakadilan bagi  
korban, keluarga dan  
masyarakat

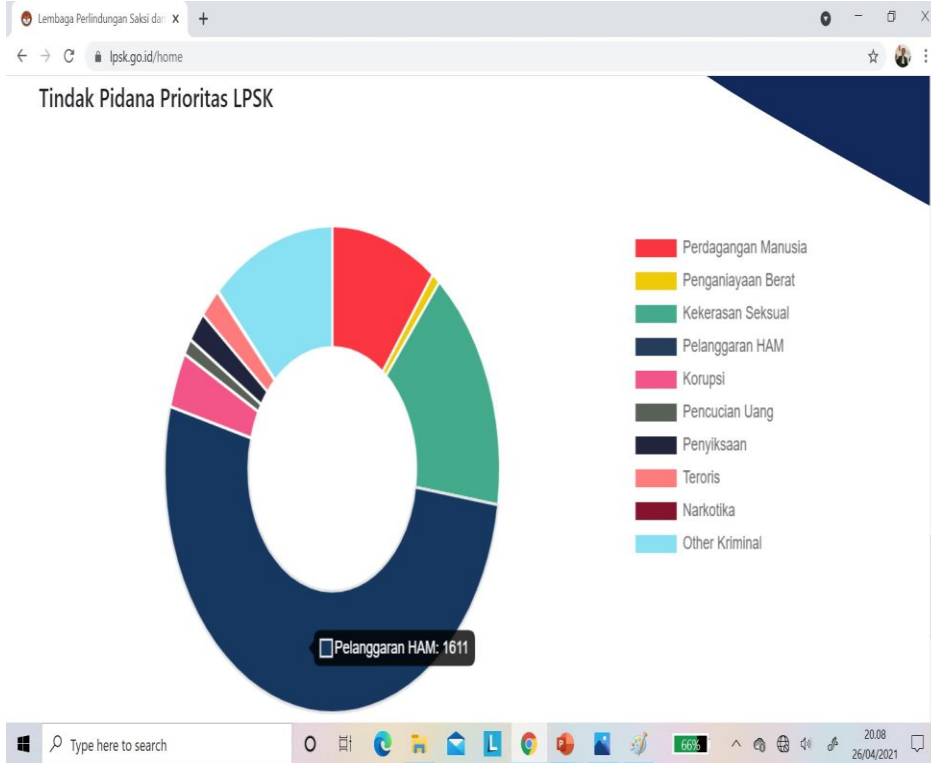
Menimbulkan  
kekhawatiran  
perulangan

Menurunkan  
kewibawan terhadap  
pemerintahan dan  
Penegakan Hukum

Merusak Sistem Hukum  
dan Keadilan



# Permasalahan dalam RPERPRES UKP PPHB



- Proses yang tidak transparan, partisipatif dan cenderung melindungi pelaku
- Tidak Jelas Turunan dari Peraturan apa, pembentukan KKR hanya dapat dibentuk oleh UU
- Pemborosan, bertentangan dengan semangat pemerintah yang melakukan perampingan birokrasi
- Tidak jelas apakah ini bentuk dari upaya penguatan bantuan medis, psikosoasial dan psikologis yang dilaksanakan oleh LPSK
- Mengalihkan hasil penyelidikan komnas HAM yang bersifat Yudisial menjadi Non Yudisial
- Konsep Rekonsiliasi lebih pada mengatasi permasalahan konflik horizontal





# KEBUTUHAN

- Perlu adanya dorongan dan dukungan dalam proses penegakan hukum
- Solusi yang efektif terhadap problematika “bolak-balik” berkas perkara
- Adanya anggaran yang cukup untuk membantu korban pelanggaran HAM
- Dukungan dari instansi lain selain LPSK dalam Bantuan Medis, Psikososial dan psikologis bagi korban pelanggaran HAM
- Mendorong lahirnya RUU KKR dengan proses pembahasan yang transparan dengan pelibatan secara aktif kepada korban dan masyarakat